

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, I., Sjaf, S., & Darusman, D. (2019). Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone (Studi Kasus Desa Sukadamai Kabupaten Bogor). *Ilmu Lingkungan*, 17, 245-255.
- Arimbawa, W., & Santhyasa, I. K. G. (2010). Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran, Bangli-Bali. *Local Wisdom*, II (4), 1-9.
- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *American Planning Association*, 85:1, 24-34.
- Baja, S. (2012). *Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah - Pendekatan Spasial dan Aplikasinya*. Penerbit ANDI.
- Bhattacharyya, S., Burman, R. R., Sharma, J. P., Padaria, R. N., Paul, S., & Singh, A. K. (2018). Model Villages Led Rural Development: A Review of Conceptual Framework and Development Indicators. *Community Mobilization and Sustainable Development*, 13(3), 513-526.
- Berisha, E., Cotella, G., Rivolin, U. J., & Solly, A. (2021). Spatial Governance and Planning Systems in The Public Control of Spatial Development: a European Typology. *European Planning Studies*, 29, 181-200.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': models, meanings and practices. *Community Development*, 43, 269-283.
- Enggraini, F., Putri, N. C., Salman, Y. A., & Handayani, W. (2020). Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Memajukan Desa Pongkok-Polanharjo, Klaten. *Inovasi Kebijakan*, 4 (2), 71-82.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33-54.
- Faludi, A. (2000). The Performance of Spatial Planning. *Planning Practice and Research*, 15 (4), 299-318.
- Femilia, Y., & Huda, U. N. (2020). Kewenangan Desa dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Hukum dan Kemanusiaan*, 14 (1), 121-140.
- Filipus, T., Tondobala, L., & Rengkung, M. M. (2019). Analisis Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan di Kabupaten Minahasa Utara. *Spasial*, 6 (1).
- Friedman, J. (1987). *Planning in the public domain*. Princeton University Press.
- Ge, D., & Yuqi, L. (2021). A strategy of the rural governance for territorial spatial planning in China. *Geographical Sciences*, 31 (9), 1349-1364.
- Hadi, E. S., & Putra, E. V. (2019). Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok *Perspektif*, 2 (3).
- Hambleton, R. (1983). Planning Systems and Policy Implementation. *Public Policy*, 3 (4), 397-418.
- Herdiansyah, A. G., & Randi. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia. *Sosiologi*, 1(1), 49-67.

- Hudayana, B., Kutanegara, P. M., Setiadi, Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., F.N., M. D., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk Pengembangan Desa Wisata di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2, 99-112.
- Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 33-48.
- Nikolic, D. S., Pantic, M. D., & Jokic, V. T. (2021). Urban and Spatial Planning: Pragmatic Consideration for Plan Implementation Improvements (A Case Study of the Sity of BOR). *SAGE Open*, 1-14.
- Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Kidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2030.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan.
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa,
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaen, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomo 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Rivolin, U. J. (2012). Planning System as Institutional Technologies: a Proposed Conceptualization and the Implications for Comparasion. *Planning Practice and Research*, 27, 63-85.
- Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan. *Regional and Rural Development Planning*, 5 (1), 15-27.
- Rustiadi, E., Hakim, S. S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor.

- Sarumaha, F. J., & Suminar, R. E. (2021). *Strategi Transformasi Menuju Desa Mandiri (Kasus Desa Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul)*
- Setiawan, B., & Rudiarto, I. (2016). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang Kota Bima. *Pembangunan Wilayah dan Kota*, 12 (2), 154-168.
- Shohibuddin, M. (2016). Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis. *Sosiologi*, 21(1), 1-33.
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta*, 15 (2), 242-260.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2007). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. PUSTAKA PELAJAR.
- Sulistioadi, S. Y. B., & Rujehan. (2020). Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRWDes) secara Partisipatif di Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara. *Hutan Tropis*, 4 (1), 30-41.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistioadi, S. Y. B., & Rujehan. (2020). Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRWDes) secara Partisipatif di Desa Muara Siran dan Desa Liang Buaya Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kertanegara. *Hutan Tropis*, 4 (1), 30-41.
- Sun, P., Zhou, L., Ge, D., Lu, X., Sun, D., Lu, M., & Qiao, W. (2021). How Does Spatial Governance Drive Rural Development in China's Farming Areas? *Habitat Internasional*, 109, 102320.
- Supriyanto. (2005). *Evaluasi Pelaksanaan RTRW pada Program Pembangunan Kota Batam* [Universitas Diponegoro]. Semarang.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Wacana*, 17 (1), 7-15.
- Susetiawan, Mulyono, D., & Roniardin, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Community Engagement*, 4, 109-118.
- Suwondo, Syahza, A., Galib, M., & Oktarianda, R. (2020). Pengembangan Peta Potensi Desa Berbasis Spasial untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *Hilirisasi IPTEKS*, 3.
- Syahfitri, C. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Pantai di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat. *Kebijakan Pemerintah*, 3(2), 62-74.
- Theresiana, E., & Dewi, S. P. (2013). Analisis Perkembangan Struktur Ruang Kawasan Bersejarah Kampung Kauman Kota Semarang. *Teknik PWK*, 2 (3).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahid, Y. (2014). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenadamedia Group.

Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Kalacakra*, 2 (1), 26-33.

Widodo, S. (2017). Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Wilayah (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo). *Administrasi Publik*, 3, 166-172.

Widyarningsih, E., Oktarina, N., & Saeroji, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Tata Ruang Kantor Terhadap Kinerja Perangkat Desa *Business and Accounting Education*, 1 (1), 43-53